

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama (*Robbins*, 1986 dalam Rai, 2008:40). Di lain pihak, Ahuya (1996) dalam Rai (2008:41) menjelaskan:

“Performance is the way of job or task is done by an individual, a group of an organi zation.”

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2013:7)

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang. Setiap organisasi berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia. Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*), dan rasio utang terhadap belanja. Pengukuran kinerja non keuangan organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja.

Rasio-rasio sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah Mahmudi (2016:140) sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$Rasio Kemandirian = \frac{Pendapatan Asli Daerah i}{bantuan Pusat/Provinsi+Pinjaman i} \times 100\%$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

2. Rasio efisiensi

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu tentang biaya pemungutan PAD. Berikut perhitungan rumus rasio kemandirian :

$$Rasio Efisiensi = \frac{Biaya Pemerolehan PAD i}{Realisasi Penerimaan PAD i} \times 100\%$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

Kriteria untuk mengukur tingkat efisiensi disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efisiensi

% Kinerja Keuangan	Kriteria
>40	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 21	Efisien
<10	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2016:142)

3. Rasio Efektivitas

Pengertian efektifitas dapat mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan Rai (2008). Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

Kriteria untuk mengukur tingkat efektifitas secara umum, nilai efektifitas PAD disajikan dan dikategorikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektifitas

% Kinerja Keuangan	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan (*Trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya oenurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya. Jika peningkatan pendapatan daerah lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)_i}{\text{Pendapatan Th } (t-1)_i} \times 100\%$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

Berdasarkan beberapa rasio diatas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dipilih dalam penelitian ini karena data yang lengkap dan tingkat kemandirian di kabupaten/kota Sumatera Selatan terkhusus tahun 2015 terjadi fluktuasi.

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan spesifik laporan keuangan adalah pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan mengenai struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan laporan keuangan merupakan gambaran dari seluruh proses akuntansi yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada prosedur akuntansi yang berlaku umum dalam satu periode akuntansi pada suatu organisasi.

\

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 71 tahun 2010) berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas laporan Keuangan

Menurut Salamun (2007) dalam Halim dan Kusufi (2014:284), Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). LPSAL merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan Halim dan Kusufi (2014:284).

Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian Laporan keuangan, Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:293), Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kasa suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris selama satu periode akuntansi.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:287), Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Nerca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.1.4 Population

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia (www.bps.go.id). Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berasal dari berbagai sumber seperti:

1. Sensus penduduk (SP)
2. Survey penduduk antar sensus (SUPAS)
3. Survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
4. Registrasi penduduk pertengahan tahun.

Sensus penduduk berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam

pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh kementerian dalam negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

2.1.5 Employment

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Pekerja produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung

perusahaan. Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) (Sumber : www.bps.go.id, diakses 15 Juni 2017)

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui Sakernas adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Informasi ketenagakerjaan (Sumber : www.bps.go.id, diakses 15 Juni 2017) tersebut meliputi:

1. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti: bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).
2. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
3. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan; alasan utama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan, lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu).

2.1.6 Size

Size atau Ukuran daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah yang salah satunya dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki daerah seperti penelitian yang dilakukan Black, dkk (2003) dalam Darmanto (2012:21). Penelitian menurut waliyani, dkk (2015) dalam Retnowati (2016:5) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki maka suatu daerah akan semakin kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya.

Ukuran pemerintah daerah (*size*) untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengungkapkan dalam paragraf 65 ayat (a) :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 menyatakan dalam paragraf-paragrafnya bahwa :

Menurut pasal 66 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Menurut pasal 67 menyebutkan bahwa Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Menurut pasal 68 menyebutkan bahwa Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Menurut pasal 69 menyebutkan bahwa Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Menurut pasal 70 menyebutkan bahwa Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Menurut pasal 71 menyebutkan bahwa Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut pasal 72 menyebutkan bahwa Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2.1.7 Rasio Utang (*Leverage*)

Leverage merupakan rasio utang yang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016:111). *Leverage* dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Rasio Utang Terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan

seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kelebihan utang (*over-leveraged*), dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang (Mahmudi, 2016:111). Rasio ini dirumuskan dengan :

$$Debt\ to\ Equity = \frac{Debt\ i}{Equity\ i}$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

2. Rasio Utang Terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini diproksikan dengan aset tetap. Namun sesuai peraturan, dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah tidak dibenarkan menjadikan aset modal pemerintah daerah sebagai jaminan. Sehingga rasio ini lebih tepat digunakan untuk sektor bisnis, sedangkan untuk sektor publik tidak begitu relevan (Mahmudi, 2016:111). Rasio ini dirumuskan dengan dengan :

$$Debt\ to\ Capital\ Assets = \frac{Debt\ i}{Capital\ Assets\ i}$$

Keterangan :

i = Kabupaten/Kota

3. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga jangka panjang. Rasio ini juga tidak bisa diterapkan pada pemerintah daerah, karena tidak adanya konsep laba dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$Times\ Interest\ Earned\ Ratio = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak}{Bunga\ Utang\ Jangka\ Panjang}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang *Population, Employment, Size*, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.3
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

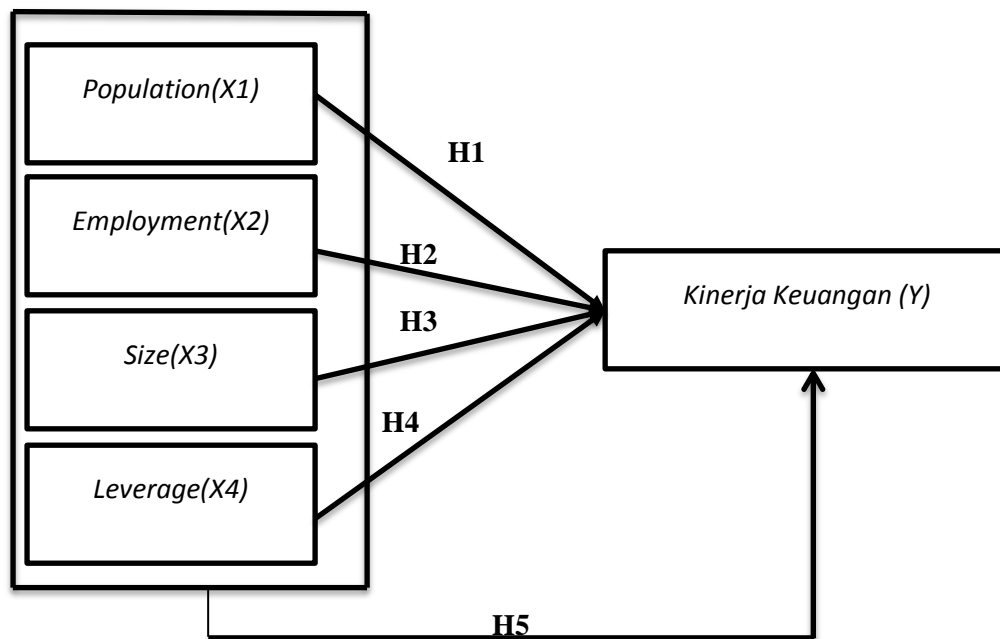
No	Judul Nama/Peneliti/ Tahun	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera) Maiyora (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah 2. kemakmuran (<i>wealth</i>) pemerintah daerah 3. ukuran legislatif pemerintah daerah 4. <i>leverage</i> pemerintah daerah 5. <i>intergovernmental revenue</i> pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah dan <i>intergovernmental Revenue</i> pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Kemakmuran (<i>wealth</i>) pemerintah daerah , ukuran legislatif pemerintah daerah dan <i>leverage</i> pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independent yang sama yaitu <i>size</i> dan <i>leverage</i>. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independent yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu, <i>population, employment</i>. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah se Sumatera, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 3. Penelitian terdahulu mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efisiensi sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian.

No	Judul Nama/Peneliti/ Tahun	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013) Retnowati (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan daerah 2. Kekayaan Daerah 3. Belanja Daerah 4. Ukuran Pemerintah Daerah 5. Leverage 6. Intergovernmental Revenue 	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Partisipasi penganggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap rasa percaya diri 2. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, leverage, dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independent yang sama yaitu ukuran pemerintah daerah (<i>size</i>) dan <i>leverage</i>. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independent yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu, <i>population</i>, <i>employment</i>. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah se Jawa Tengah, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 3. Penelitian terdahulu mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efisiensi sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian

No	Judul Nama/Peneliti/ Tahun	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Population, Employment, Size Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Darmanto (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Population 2. Employment 3. <i>Size</i> 4. Leverage 5. Kinerja Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah penduduk (population) dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia 2. variabel jumlah tenaga kerja (employment) dan ukuran (size) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti menggunakan variabel dependent dan independent yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah Di Indonesia sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 2. Peneliti hanya mengukur kinerja keuangan dengan raso kemandirian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh *population*, *employment*, *leverage*, dan *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dinyatakan dengan rasio kemandirian maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu *Population (X1)*, *Employment (X2)*, *Size (X3)*, dan *Leverage (X4)* terhadap variabel dependen yaitu Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh *Population* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- H2 : Terdapat pengaruh *Employment* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- H3 : Terdapat pengaruh *Size* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- H4 : Terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- H5 : Terdapat pengaruh *population, employment, Size, dan leverage* secara Simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah/Kota di Sumatera Selatan